

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KRANGGAN
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
TAHUN 2019**

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA TAHUN 2020
KECAMATAN KRANGGAN**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN KRANGGAN**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 19 Juni 2019

Koordinator Bidang
Pemerintahan-Kecamatan

Sub Koordinator
Bidang Pemerintahan-Kecamatan

DANANG PURWANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19630321 199403 1 007

TEGUH SUPRIYANTO, SE, M.Si

Penata
NIP. 19780424 199703 1 002

Mengetahui,

Plt.KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris

RIPTO SUSILO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670427 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Kranggan dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kranggan Tahun 2020. Rencana Kerja ini disusun sebagai implementasi Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2023 pada Tahun Anggaran 2020.

Rencana Kerja Kecamatan Kranggan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas – tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas – tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap SKPD termasuk Kecamatan Kranggan.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Kranggan Tahun 2020 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas – tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Kranggan.

Kranggan, 19 Juni 2020

CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.SI

Pembina Tingkat I

NIP. 19701223 199703 009 1001

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KRANGGAN TAHUN 2019.....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kranggan	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kranggan.....	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	
BAB III : Masyarakat.....	63

	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	64
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	64
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kranggan	64
	3.3 Program dan Kegiatan	65
BAB IV	: PENUTUP.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan dan Capaian Renstra s.d Tahun 2018...	13
Tabel 2.2.1.	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018.....	25
Tabel 2.2.2.	Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018.....	26
Tabel 2.2.3.	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018.....	27
Tabel 2.2.4.	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018.....	28
Tabel 2.2.5.	Persentase desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018.....	29
Tabel 2.2.6.	Persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018.....	30
Tabel 2.2.7.	Persentase cakupan desa tangguh bencana Tahun 2014-2018.....	34

Tabel 2.2.8. Persentase rumah tidak layak huni Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018.....	35
Tabel 2.2.9. Persentase rumah ibadah kondisi baik Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018.....	36
Tabel 2.2.10. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018.....	37
Tabel 2.2.11. Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018.....	37
Tabel 2.2.12. Persentase desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu	38
Tabel 2.2.13. Persentase angka kriminalitas Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018.....	39
Tabel 2.4.1. Review terhadap Rancangan awal RKPDP Tahun 2010	42
Tabel 2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan.....	63
Tabel 3.2.1. Matrik keterkaitan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Kecamatan Kranggan.....	64
Tabel 3.3.1. Rencana program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2020.....	67



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KRANGGAN

Jln. Kranggan – Kaloran KM. 1 Telpn (0293) 492677 Temanggung 56271

Keputusan Camat Kranggan

Nomor : 050/ /2019

TENTANG

Pembentukan Tim Rencana Kinerja Tahun 2020

Kecamatan Kranggan

Camat Kranggan

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Perencanaan Kinerja Kecamatan Kranggan perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kinerja Kecamatan Kranggan ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Kranggan tentang Tim Penyusun Rencana Kinerja Kecamatan Kranggan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah; dan
18. Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan Camat Kranggan untuk menduduki jabatan dalam Tim Penyusun Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kranggan
 Pada tanggal : 24 Januari 2019

CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si

Pembina Tk I

NIP.19701223 199009 1 001

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1.Kepala Bappeda Kab.Temanggung

2.Arsip

Daftar Lampiran Keputusan Camat Kranggan

Nomor : 050/ /2019

Tanggal : 24 Januari 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
----	---------	---------------------	------------------------

1	TRI RAHARJO, S.IP, M.Si	Camat Kranggan	KETUA
2	Dra. TRI MARIANA ELIYAWATI	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
3	AGUS SUSANTO, S.IP	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
4	HARYANIK, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5	ANIEK ANDAYANI KURNIAWATI	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
6	BENY SULISTYANINGSIH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	ROVIK BUDIARTO	Pengadministrasi Umum	Anggota

CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Tk I
NIP.19701223 199009 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

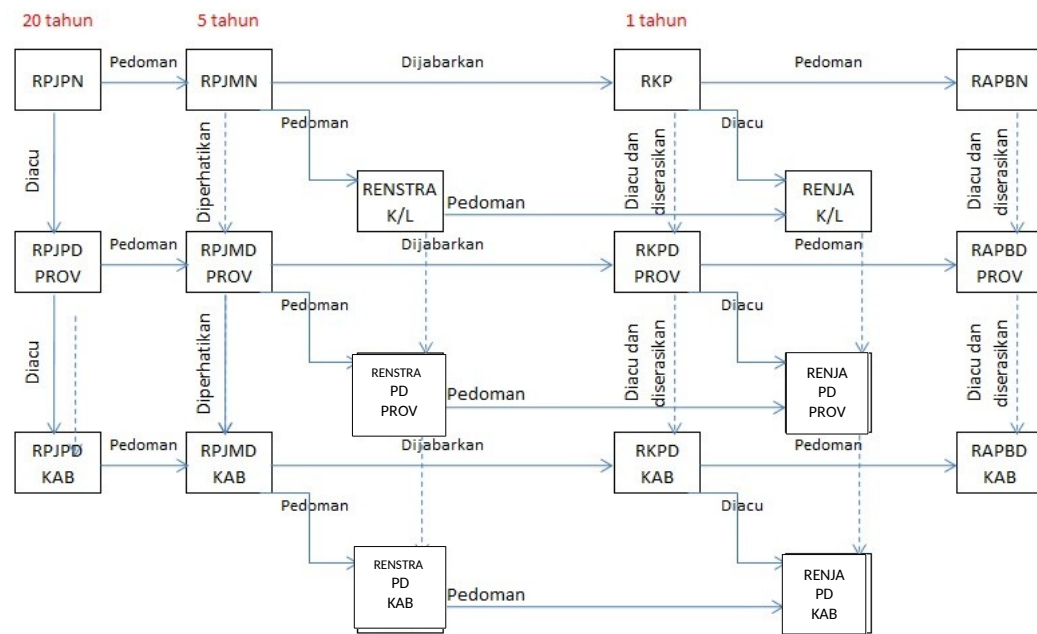
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2020 yang merupakan indikasi tahun kedua RPJMD Tahun 2019-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2020 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2020.

Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2020 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi serta mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2020 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Kranggan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Data Pokok Perencanaan Kecamatan Kranggan.
- 2) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya yaitu tahun 2019.
- 3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Kecamatan Kranggan.

- 4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kranggan.
- 5) Review rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020.
- 6) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- 7) Informasi lainterkait pelayanan di Kecamatan Kranggan.

b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2019

Hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan.
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan.
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan di Kecamatan Kranggan.
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Kecamatan Kranggan

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kranggan.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kecamatan Kranggan

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Kranggan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

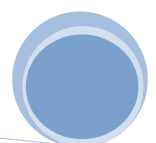
- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kranggan .
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan .
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*) .
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kranggan .
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra Kecamatan Kranggan .
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja Kecamatan Kranggan.

f. Perumusan tujuan dan sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan



Kranggan yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kecamatan Kranggan tahun 2020.

g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian Dokumen Rancangan Awal Renja Kecamatan Kranggan

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Kecamatan Kranggan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

j. Telaahan Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang

pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kranggan

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kranggan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Kranggan dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Kranggan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Kranggan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Kranggan dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.



o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Kranggan dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Kranggan yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja Kecamatan Kranggan dengan dokumen RKPD

Dokumen rancangan akhir Renja Kecamatan Kranggan disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah Kecamatan Kranggan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah



diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2020 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kranggan untuk Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kranggan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2020 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kranggan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2020;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2020;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2020; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kranggan Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang renja perangkat daerah, proses penyusunan renja perangkat daerah, keterkaitan antara renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, renstra perangkat daerah, renja kementerian/lembaga dan renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah

1.4. Sistematika Penulisan bahasan dalam penulisan renja perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.

KRANGGAN TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan

Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2018 dan perkiraan capaian Tahun 2019 yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang



seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Kranggan sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kranggan

Memuat data pokok pembangunan kondisi 5 (lima) tahun terakhir (2014-2018).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kranggan

Hal ini mempunyai maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan yang didasarkan analisis gambaran pelayanan Kecamatan Kranggan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Kranggan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
4. Serta lampirkan table 2.3 yaitu table review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan kajian usulan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pengamatan dalam musrenbang.

BAB III.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam rancangan awal RKP.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kranggan penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kranggan.

Memuat perusuman tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

3.3 Program dan Kegiatan

Memuat penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV.

Memuat uraian penutup, berupa ; catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

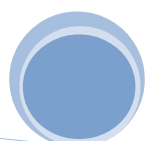
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KRANGGAN TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Kranggan

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan s.d. Triwulan IV tahun 2018 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kranggan berupa:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan (100%);
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan (>100%);
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan (<100%).

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan
& Capaian Renstra s.d Tahun 2018

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	(%)	(%)	K	Rp.	%	%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+13)	18	19
1	PENDIDIKAN																	
a	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun																	
1	Fasilitasi lomba pelajar tingkat Kecamatan	Terselenggaranya lomba pelajar tingkat Kecamatan	keg	3	5.000.000	3	7.050.000	3	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0,00	0	7.050.000,00	0	0,00
2	KESEHATAN																	
a	Program Upaya Kesehatan masyarakat																	
1	Pembinaan UKS/LSS	Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat di	SD/MI	5	20.000.000	1	10.000.000	1	3.800.000	4.865.000	1	4.865.000	1	100	1	14.865.000	1	74,32

RENJA 2020

		lingkungan sekolah dasar																
3	PERENCANAAN																	
a	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																	
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Tersusunannya dokumen perencanaan	Dokumen	13	12.500.000	12	5.248.500	12	1.500.000	2.500.000	13	2.200.000	13	88	13	7.448.500	13	59,58
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	desa	12	41.000.000	12	9.425.000	12	3.900.000	3.900.000	12	3.900.000	12	100	12	13.325.000	12	32,5
2	Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Desa/Kel	5	61.000.000	1	17.430.000	1	5.000.000	3.970.000	1	3.970.000	1	100	1	21.400.000	1	35,08
3	Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK desa	Desa/Kel	13	0	13	30.610.000	13	13.000.000	8.000.000	13	8.000.000	12	100	13	38.610.000	13	100
4	Fasilitasi bantuan keuangan kepada Desa	Terlaksananya fasilitasi bantuan keuangan ke desa	Desa/Kel	13	0	12	0	13	5.691.000	5.691.000	13	2.883.000	13	50,65	13	2.883.000	13	50,65

b	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan																	
1	Fasilitasi penyusunan RKP desa/kelurahan	Tersusunnya RKP desa/kelurahan	Desa/Kel	13	0	13	7.800.000	13	3.900.000	2.850.000	13	2.850.000	13	100	13	10.650.000	13	100
2	Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan	Terlaksananya musrenbang musyawarah desa/kelurahan dan pemantauan kegiatan pembangunan yang beralokasi di kecamatan	Desa/Kel	13	34.100.000	13	15.750.000	13	9.750.000	9.440.000	13	9.440.000	13	100	13	25.190.000	13	100
c	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa																	
1	Fasilitasi dan evaluasi peraturan Desa tentang APBDes	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	Desa/ Kelurahan	12	29.500.000	12	9.100.000	12	2.600.000	3.400.000	12	3.400.000	12	100	12	12.500.000	12	100
	Fasilitasi Dana Transfer	Tercukupinya penyaluran dana transfer	Desa/ Kelurahan	12	26.700.000	12	19.925.000	12	7.615.000	7.050.000	12	4.602.000	12	65,27	12	24.527.000	12	65,27
5	SOSIAL																	

RENJA 2020

a	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																	
1	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	Desa/Kel	13	0	13	0	13	3.465.000	3.465.000	13	3.465.000	13	100	13	3.465.000	13	100
b	Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan																	
1	Sosialisasi Penanganan Bencana Alam	Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan penanganannya	desa	12	162.700.000	12	7.800.000	12	3.406.000	3.406.000	12	3.406.000	12	100	12	11.206.000	12	100
6	KEBUDAYAAN																	
a	Program pengembangan nilai keagamaan																	
1	Fasilitasi kegiatan beragama	Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	Desa/Kel	13	80.000.000	13	5.395.000	13	6.500.000	6.465.000	13	6.465.000	13	100	13	11.860.000	13	100
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
a	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal																	
1	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan	Meningkatnya keamanan, ketr entaman ketertiban	Kec.	12	0	12	0	12	15.000.000	3.827.000	12	3.827.000	12	100	12	3.827.000	12	100

	siskamswakarsa di daerah	masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas																
2	Pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat kecamatan	terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat kecamatan	Desa/Kel	13	0	13	0	13	3.770.000	3.770.000	13	3.575.000	13	94,82	13	3.575.000	13	94,82
8	PANGAN																	
a	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan																	
1	Pendampingan Program Barang Bersubsidi	Lancarnya penyaluran raskin	Desa/Kel	13	0	13	5.395.000	13	5.200.000	3.590.000	13	3.590.000	13	100	13	8.985.000	13	100
9	LINGKUNGAN HIDUP																	
a	Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																	
1	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Terciptanya kebersihan lingkungan Desa/Kelurahan	Desa/kel	13	48.150.000	13	7.800.000	13	3.875.000	3.985.000	13	3.985.000	13	100	13	11.785.000	13	100,00
10	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN																	

	PENCATATAN SIPIL																	
a	Program Penataan Administrasi Kependudukan																	
1	Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	desa	12	21.350.000	12	7.800.000	12	4.436.000	4.436.000	12	4.436.000	12	100	12	12.236.000	12	57,31
11	STATISTIK																	
a	Program pelayanan administrasi perkantoran																	
1	Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil desa/kelurahan	Tersusunannya profil desa/kelurahan	Desa/ Kelurahan	13	0	13	3.900.000	13	3.900.000	3.725.000	13	3.725.000	13	100	13	7.625.000	13	100!
12	KEUANGAN																	
a	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Daerah																	
1	Koordinasi Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan	Terpenuhinya target pendapatan daerah	Desa/ Kelurahan	13	484.000.000	13	164.997.000	13	99.700.000	58.697.000	13	57.660.000	13	98,23	13	222.657.000	13	46

13	PENDUKUNG KEPALA DAERAH																	
a	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah																	
1	Fasilitasi dan verifikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di kecamatan	Bulan	12	104.900.000	12	19.710.000	12	3.250.000	3.800.000	12	1.600.000	12	42,10	12	21.310.000	12	20,31
2	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan	bulan	12	0	12	6.000.000	12	3.565.000	3.565.000	12	3.565.000	12	100	12	9.565.000	12	100
f	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa																	
1	Rapat koordinasi kades dan perangkat desa	Terciptanya koordinasi antar kades dan perangkat desa	Desa/ Kelurahan	12	29.500.000	12	10.400.000	12	5.200.000	3.918.000	12	3.918.000	12	100	12	14.318.000	12	48,53
2	Pelatihan aparatur pemerintah	Meningkatnya SDM aparatur	Desa/ Kelurahan	13	26.700.000	13	10.400.000	13	5.200.000	4.155.000	13	4.155.000	13	100	13	14.555.000	13	54,51

RENJA 2020

	desa/kelurahan	pemerintahan desa/kelurahan	n															
3	Fasilitasi pengisian BPD dan pelantikan BPD antar waktu	Terisinya kekosongan anggota BPD	Desa	12	0	12	0	12	4.865.000	4.865.000	12	-	0	0	12	-	0	0
4	Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes	Terisinya kekosongan perangkat desa	desa	12	0	12	6.000.000	13	4.950.000	4.950.000	12	-	0	0	12	-	0	0
14	KEWILAYAHAN																	
a	Program pelayanan administrasi perkantoran																	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Bulan	12	63.700.000	12	39.449.000	12	15.000.000	17.000.000	12	7.435.841	12	43,74	12	46.884.841	12	73,60
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	Bulan	12	10.850.000	12	35.600.000	12	15.400.000	9.951.000	12	8.957.448	12	90,01	12	44.557.448	12	410,66
3	Penyediaan alat tulis kantor	Terbayarnya alat tulis kantor	Bulan	12	38.900.000	12	21.750.000	12	7.750.000	5.735.000	12	5.735.000	12	100	12	27.485.000	12	70,65
4	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Bulan	12	20.000.000	12	11.873.000	12	3.900.000	5.000.000	12	3.750.000	12	75	12	15.623.000	12	78,11
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/peneran	Bulan	12	10.850.000	12	7.000.000	12	2.000.000	2.000.000	12	2.000.000	12	100	12	9.000.000	12	82,94

		gan bangunan kantor																
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	6.060.000	12	3.840.000	12	1.200.000	1.392.000	12	1.392.000	12	100	12	5.232.000	12	86,33
7	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama	Bulan	12	129.120.000	12	58.740.000	12	28.800.000	22.315.000	12	20.101.000	12	90,07	12	78.841.000	12	61,06
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	0	12	709.368.000	12	35.000.000	19.500.000	12	18.868.000	12	96,75	12	728.236.000	12	96,75
9	Jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan lembur	Bulan	12	0	12	2.986.000	12	3.000.000	10.608.000	12	6.628.000	12	62,48	12	9.614.000	12	62,48
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Bulan	12	0	12	24.480.000	12	15.000.000	19.956.000	12	19.400.746	12	97,21	12	43.880.746	12	97,21
b	Program																	

Dari lampiran tabel 2.1.1 maka dapat diketahui pencapaian target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Program upaya kesehatan masyarakat
Kegiatan :
 - Pembinaan UKS/LSS dengan capaian kinerja 100%.
- 2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Kegiatan :
 - Koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan capaian kinerja 100%
- 3) Program pencegahan dan kesiap-siagaan
Kegiatan :
 - Sosialisasi penanganan bencana alam dengan capaian kinerja 100%
- 4) Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
Kegiatan :
 - Pendampingan program barang bersubsidi dengan capaian kinerja 100%
- 5) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Kegiatan :
 - Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan dengan capaian kinerja 100%
- 6) Program penataan administrasi kependudukan
Kegiatan :
 - Fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lainnya dengan capaian 100%
- 7) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Kegiatan :
 - Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan dengan capaian kinerja 100%.
 - Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan dengan capaian kinerja 100%.
 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan capaian kinerja 100%.
 - Fasilitasi bantuan keuangan kepada desa dengan capaian kinerja 50,65%, hal ini karena tidak terlaksananya sebagian kegiatan.
- 8) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
Kegiatan :
 - Fasilitasi penyusunan RKPDesa dengan capaian kinerja 100%

- Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan dengan capaian kinerja 100%
- 9) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- Kegiatan :
- Fasilitasi dan evaluasi perdes tentang APBDesa dengan capaian kinerja 100%;
 - Fasilitasi dana transfer dengan capaian kinerja 65,28%, hal ini karena tidak terlaksananya sebagian kegiatan.
- 10) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- Kegiatan :
- Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan dengan capaian kinerja 100%
- 11) Program pengembangan nilai keagamaan
- Kegiatan :
- Fasilitasi kegiatan keagamaan dengan capaian kinerja 100%
- 12) Program perencanaan pembangunan daerah
- Kegiatan :
- Penyusunan dan pelaporan perangkat daerah dengan capaian kinerja 88%, hal ini karena adanya sisa anggaran.
- 13) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- Kegiatan :
- Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan dengan capaian kinerja 98,23%; hal ini dikarenakan masih adanya desa yang belum melunasi PBB sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- 14) Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Kegiatan :
- Fasilitasi dan verifikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dengan capaian kinerja 42,11%; hal ini dikarenakan sebagian perijinan telah diambil alih pelaksanaannya di DPMPSTSP Kabupaten Temanggung, sehingga kecamatan hanya diberi wewenang untuk perijinan IMB dibawah Rp. 250.000.000,- saja.
 - Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan dengan capaian kinerja 100%

15) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Kegiatan :

- Pelatihan aparatur pemerintahan desa/kelurahan dengan capaian kinerja 100%

16) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Kegiatan :

- Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah dengan capaian kinerja 100%
- Pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat kecamatan dengan capaian kinerja 94,8%, hal ini disebabkan ada sisa anggaran dalam kegiatan.

17) Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dengan capaian kinerja 43,74%, hal ini disebabkan karena adanya sisa anggaran;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan capaian kinerja 90,01%, hal ini disebabkan karena adanya sisa anggaran;
- Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian kinerja 100%;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja 75%, hal ini juga disebabkan adanya sisa anggaran;
- Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor dengan capaian kinerja 100%;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja 100%;
- Penyediaan makanan dan minuman dengan capaian kinerja 90,07%, hal ini disebabkan adanya sisa anggaran karena bulan puasa ;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja 96,75%, disebabkan adanya sisa anggaran;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan capaian kinerja 97,21%, hal ini karena adanya sisa anggaran;
- Jasa pelayanan perkantoran dengan capaian kinerja 62,48%, hal ini karena adanya sisa anggaran .

18) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja 100%;
- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja 100%;
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan capaian kinerja 100%;

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan capaian kinerja 86,44%, ini disebabkan adanya sisa anggaran;
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja 60%, ini disebabkan adanya sisa anggaran;
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja 93,14%, ini disebabkan adanya sisa anggaran;

19) Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan capaian kinerja 88,9%, ini disebabkan adanya sisa anggaran karena pegawai yang telah pensiun.

Secara umum dapat diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan IV Tahun 2018 rata-rata seluruh kegiatan sudah mencapai 90,52%.

Ada beberapa kegiatan yang menjadi prioritas tetapi tidak masuk dalam dokumen Anggaran kecamatan Kranggan yaitu rehabilitasi rumah Dinas Camat, hal ini tentu berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas di tingkat Kecamatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kranggan

Kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan dapat dilihat dari indikator kinerja yang tercermin dalam data pokok pembangunan, sebagai berikut :

1. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi

jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.1

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Kranggan (jiwa)	0	0	0	2	2
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kranggan (jiwa)	159	155	147	146	149
3	Persentase (%)	0	0	0	1,37	1,34

Sumber : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kranggan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 menurun

2. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kranggan dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kranggan. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan

Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kranggan (jiwa)	32.931	33.784	34.027	34.285	35.487
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kranggan (jiwa)	34.019	34.003	36.112	36.469	36.782
3	Persentase (%)	96,8	99,3	94,3	94	96,5

Sumber : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kranggan, Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2014 – 2018 cenderung fluktuatif, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el KE Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo.

3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah

jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%.

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah

Tabel 2.2.3
Persentase realisasi penerimaan PBB
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan	681.769.249	736.921.921	270.206.543	685.837.583	669.631.595
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Kranggan	687.807.805	745.567.100	653.196.455	714.788.143	743.686.453
3	Persentase (%)	99,12	98,84	41,36	95,94	90,04

Sumber : Mantri Pajak Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan cenderung fluktuatif karena dari tahun 2014 sampai dengan 2016 menurun untuk kemudian dari tahun 2016 sampai dengan 2018 naik kembali.

4. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Kranggan Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.4

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset	12	12	12	12	12
2	Jumlah Desa	12	12	12	12	12
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah 100%.

5. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.5
Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	12	12	12	12	11
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	100	100	100	100	91,6

Sumber: Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kranggan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2017 adalah 100% terus, sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 91,6% karena ada 1 desa yang tidak tepat waktu mengirim laporan. Namun demikian hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban baik.

6. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan

Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.6
 Persentase Penanganan Laporan Kejadian
 di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	22	32	13	11	17
2	Jumlah laporan kejadian	22	32	13	11	17
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Kasi Ketrentaman & Ketertiban Umum Kec. Kranggan Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung selalu 100 %.

7. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka,

terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota

Secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

1. **Legislasi** yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
2. **Perencanaan** berupa penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
3. **Kelembagaan** yaitu pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana
4. **Pendanaan** berupa rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
5. **Pengembangan kapasitas** berupa pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana
6. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
2. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
9. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
10. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana.

Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a) Bencana adalah urusan bersama..
- b) Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.
- c) Pemenuhan Hak Masyarakat.
- d) Pelaku Utama.
- e) Dilakukan Secara Partisipatoris.
- f) Mobilisasi Sumber Daya Lokal.
- g) Berlandaskan Kemanusiaan.
- h) Keadilan dan Kesetaraan Gender
- i) Keberpihakan Pada Kelompok Rentan.
- j) Transparansi dan Akuntabilitas.
- k) Kemitraan.
- m) Inklusif.
- n) Multi Ancaman.
- o) Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.
- p) Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan.
- q) Diselenggarakan Secara Lintas Sektor.

Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini

Tabel 2.2.7

Cakupan Desa Tangguh Bencana, Tahun 2014 - 2018

No	Kriteria	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	0	3	3
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	0	0	5	5
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	0	60	60

Sumber: Kasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kranggan, Tahun 2018

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 masih 0%, baru pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar 60%.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **Daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

8. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.8

Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018

		Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	1171	1092	1013	850	761

2.	Jumlah yang ditangani		79	79	163	89
3.	Jumlah rumah tinggal	8940	9372	9804	10235	10668
4.	Persentase	13,09	11,65	10,33	8,3	7,13

Sumber : Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase RTLH cenderung menurun. Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Kranggan pada Tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 1092 unit menjadi 850 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 242 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

9. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.9
 Persentase rumah ibadah kondisi baik
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik					
	- Islam	232	231	231	231	230
	- Kristen	13	13	13	13	13
	- Katholik	-	-	-	-	-
	- Hindu	-	-	-	-	-
	- Budha	-	-	-	-	-
	- Konghuchu	-	-	-	-	-
2.	Jumlah rumah ibadah	245	244	244	244	243
	% rumah ibadah kondisi baik	75	75	75	75	75

Sumber : Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kranggan 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik adalah 75%.

10. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.2.10
 Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu

di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	n.a	n.a	n.a	10	11
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	12	12
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	0	0	0	83,33	91,66

Sumber : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan, 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 91,66 %.

11. **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.11

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang	10	11	9	9	10

	menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu					
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	83,3	91,6	75	75	83,3

Sumber : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menurun. Sedangkan pada tahun 2018 cenderung meningkat karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan RKPDes.

12. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.12

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	10	11	10	10	11
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12

3	Persentase	83,3	91,6	83,3	83,3	91,6
---	------------	------	------	------	------	------

Sumber : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung fluktuatif karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan APBDes.

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Kranggan dari tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.13

Angka Kriminalitas Kecamatan Kranggan

Tahun 2014-2018

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah	1	-	-	-	-

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Kejahatan Seksual					
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	3	6	5	3	1
5.	Jumlah kasus Pencurian	17	23	8	4	3
6.	Jumlah kasus Penipuan	1	3	0	4	3
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	22	32	13	11	7
9.	Jumlah Penduduk	47.535	48.574	49.621	50.607	51.437
10	Angka Kriminalitas	0,04	0,06	0,02	0,02	0,01

Sumber : Polsek Kranggan Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan Kranggan cenderung menurun.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Kranggan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan sebagaimana berikut:

- 1). Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kranggan.
- 2). Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan.

- 3). Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Bupati.
- 4). Selain permasalahan dan hambatan yang dihadapi, terdapat juga tantangan dan peluang yang harus diupayakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan.
- 5). Catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan di tahun 2019.

Adapun isu strategis Kecamatan Kranggan adalah sebagai berikut:

- 1). Belum optimalnya pelayanan publik.
- 2). Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan.
- 3). Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
- 4). Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan.
- 5). Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- 6). Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi termasuk teknologi informatika dan inovasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan.
- 7). Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 8). Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat.
- 9). Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga.
- 10). Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja Kecamatan Kranggan.

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Kranggan tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan diluar rancangan awal Kecamatan Kranggan.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.4.1

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA TIDAK LANGSUNG								
	Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung								Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung						
BELANJA LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG								
A.	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan						A.	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan							
1	Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitas bidang tata pemerintahan, meliputi : Pelayanan administrasi kependudukan; Pelayanan permohonan perijinan dan non perizinan sesuai kewenangan kecamatan; pengelolaan dan layanan	12	bulan	22.000.000	1	Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitas bidang tata pemerintahan, meliputi : Pelayanan administrasi kependudukan; Pelayanan permohonan perijinan dan non perizinan sesuai kewenangan kecamatan; pengelolaan dan layanan	12	bulan	22.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPД 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			informasi publik tingkat kecamatan ; Penyusunan LPPD dan LKPPD; penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD, dan PAW BPD; pembinaan							informasi publik tingkat kecamatan ; Penyusunan LPPD dan LKPPD; penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD, dan PAW BPD; pembinaan				

RANCANGAN AWAL RKPD 2020						
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			pengisian buku administrasi desa; pelatihan aparatur pemerintahan desa; penanganan Pertanahan			
2	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan, perpenunyi target pendapatn daerah	12	bulan	70.000.000
B.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan					
1	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan	12	bulan	48.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	
			pengisian buku administrasi desa; pelatihan aparatur pemerintahan desa; penanganan Pertanahan				
2	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan, perpenunyi target pendapatn daerah	12	bulan	70.000.000	
B.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan						
1	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan	12	bulan	48.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/ kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan , penganggara n dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa; pembinaan pengelolaan keuangan							masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/ kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan , penganggara n dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa; pembinaan pengelolaan keuangan				

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			desa dan tertib administrasi keuangan desa; pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kec; penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan dan pendampingan desa binaan; pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan							desa dan tertib administrasi keuangan desa; pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kec; penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan dan pendampingan desa binaan; pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan				

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			desa/kel, masyarakat, adat, dan hukum adat; pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat; pembinaan dan pengawasan BUMDesa dan BUMDesa bersama; pembinaan dan pengawasan penyelengga raan kerjasama antar desa							desa/kel, masyarakat, adat, dan hukum adat; pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat; pembinaan dan pengawasan BUMDesa dan BUMDesa bersama; pembinaan dan pengawasan penyelengga raan kerjasama antar desa				

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			dan musyawarah antar desa; pengolahan data profil desa/kelurahan dan profil kecamatan, pelaksanaan program kota tanpa kumuh.							dan musyawarah antar desa; pengolahan data profil desa/kelurahan dan profil kecamatan, pelaksanaan program kota tanpa kumuh.				
2	Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kecamatan	Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan PKK di Kecamatan dan pembinaan PKK desa/kelurahan	12	bulan	12.000.000	2	Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kecamatan	Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan PKK di	12	bulan	12.000.000	
3	Fasilitasi Kota Tanpa	Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi kota tanpa	1	kelurahan	5.000.000	3	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi kota tanpa	1	kelurahan	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKP2020						
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Kumuh		kumuh			
4	Fasilitasi Kawasan Perdesaan	Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi perdesaan	12	bulan	5.000.000
C. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan						
1	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan	12	bulan	18.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	
			kumuh				
4	Fasilitasi Kawasan Perdesaan	Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi kawasan perdesaan	12	bulan	5.000.000	
C. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan							
1	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan	12	bulan	18.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi; pendataan rumah ibadah; perayaan hari besar keagamaan; pemberdayaan sosial dan perlindungan jaminan sosial; pembinaan							kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi; pendataan rumah ibadah; perayaan hari besar keagamaan; pemberdayaan sosial dan perlindungan jaminan sosial; pembinaan				

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
			dan pengawasan pemberdaya an potensi sumber kesejahteraa n sosial; rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan dan pemberdaya an organisasi sosial dan kemasyaraka tan; pembinaan dan pengawasan							dan pengawasan pemberdaya an potensi sumber kesejahteraa n sosial; rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan dan pemberdaya an organisasi sosial dan kemasyaraka tan; pembinaan dan pengawasan					

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			kekerasan terhadap perempuan dan anak; pelaksanaan program barang bersubsidi dengan lancar.							kekerasan terhadap perempuan dan anak; pelaksanaan program barang bersubsidi dengan lancar.				
2	Koordinasi penanggulangan Kemiskinan	Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat kecamatan dan monitoring Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	12	bulan	6.000.000	2	Koordinasi penanggulangan Kemiskinan	Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat kecamatan dan monitoring Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	12	bulan	6.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPД 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
D. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan							D. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan							
1	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan	12	bulan	7.600.000	1	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan	12	bulan	7.600.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020						
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			kegiatan Pemilihan umum; perayaan hari besar nasional.			
2	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopinc a)	Kecamatan	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	12	bulan	13.200.000
II	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH					
A.	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah					
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan, pelaporan yang tepat waktu (RENSTRA,	27	dokumen	5.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	
			kegiatan Pemilihan umum; perayaan hari besar nasional.				
2	Pemantauan kegiatan Pilpres dan Pileg di tingkat Kecamatan	Kecamatan	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	12	bulan	13.200.000	
II	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH						
A.	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah						
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan, pelaporan yang tepat waktu (RENSTRA,	27	dokumen	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020						
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan I s/ d IV, RFK bln Januari s/d Desember, RKA, DPA, RKPA, DPPA dan Pakta Integritas)			
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	12	Bulan	9.000.000
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	12	Bulan	21.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	
			RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan I s/ d IV, RFK bln Januari s/d Desember, RKA, DPA, RKPA, DPPA dan Pakta Integritas)				
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	12	Bulan	9.000.000	
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	12	Bulan	21.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
3	Penyediaan alat tulis kantor		Terbayarnya alat tulis kantor	12	Bulan	6.565.500	3	Penyediaan alat tulis kantor		Terbayarnya alat tulis kantor	12	Bulan	6.565.500	
4	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kecamatan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12	Bulan	5.500.000	4	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kecamatan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12	Bulan	5.500.000	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	4.000.000	5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	4.000.000	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	1.500.000	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	1.500.000	
7	penyediaan makanan	Kecamatan	makanan dan minuman	12	Bulan	22.000.000	7	penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan	makanan dan minuman	12	Bulan	22.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	dan minuman		harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama					minuman		harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama				
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	21.000.000	8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	21.000.000	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kecamatan	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	23.000.000	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kecamatan	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	23.000.000	
10	Jasa pelayanan perkantoran	Kecamatan	Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan lembur	12	Bulan	4.000.000	10	Jasa pelayanan perkantoran	Kecamatan	Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan lembur	12	Bulan	4.000.000	
11	Penyediaan Jasa Pengamanan gedung	kecamatan	Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	12	bulan	43.400.000	11	Penyediaan Jasa Pengamanan gedung	kecamatan	Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	12	bulan	43.400.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020						
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	kantor					
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	12.000.000
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan	Tersedianya peralatan gedung kantor	12	bulan	12.000.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	10.000.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	20.000.000
6	Pemeliharaan rutin/berkala	Kecamatan	Terpeliharanya perlengkapan	12	Bulan	4.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	
	kantor						
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	20.000.000	
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan	Tersedianya peralatan gedung kantor	12	bulan	12.000.000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	10.000.000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	20.000.000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala	Kecamatan	Terpeliharanya perlengkapan	12	Bulan	4.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2020						
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	perlengkapan kantor		n gedung kantor			
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan	Terpeliharaan ya peralatan gedung kantor	12	Bulan	5.000.000
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18	Orang	5.000.000
A.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan					
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Kelurahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan	7	keg	656.900.000
2	Fasilitasi Penyeleng	Kelurahan	Terlaksananya	12	bulan	26.600.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	
	la perlengkapan kantor		n gedung kantor				
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan	Terpeliharaan ya peralatan gedung kantor	12	Bulan	5.000.000	
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
1	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Kecamatan	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18	Orang	5.000.000	
A.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan						
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Kelurahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan	7	keg	656.900.000	
2	Fasilitasi Penyeleng	Kelurahan	Terlaksananya	12	bulan	26.600.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	garaan Sarana Prasarana Lokal Lingkunga n		Penyelengga raan Sarana Prasarana Lokal Lingkungan					araan Sarana Prasarana Lokal Lingkungan		Penyelengga raan Sarana Prasarana Lokal Lingkungan				
3	Fasilitas Kota Tanpa Kumuh	Kelurahan	terlaksanany a Fasilitas Kota Tanpa Kumuh	12	bulan	5.000.000	3	Fasilitas Kota Tanpa Kumuh	Kelurahan	terlaksanany a Fasilitas Kota Tanpa Kumuh	12	bulan	5.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan							Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan							
1	Pemberda yaan Masyarak at di Kelurahan	Kelurahan	terlaksanany a fasilitas kegiatan kelembagaan Kelurahan	5	lembaga	120.000.000	1	Pemberday aan Masyaraka t di Kelurahan	Kelurahan	terlaksanany a fasilitas kegiatan kelembagaan Kelurahan	5	lembaga	120.000.00 0	
2	Fasilitas Gerakan Budaya Sehat dan Kebersiha n Lingkunga n	Kelurahan	Terciptanya kebersihan lingkungan Desa/Kelura han	7	Lingkun gan	12.000.000	2	Fasilitas Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan	Terciptanya kebersihan lingkungan Desa/Kelura han	7	Lingkun gan	12.000.000	
3	Fasilitas penyusun an dan pemberda	Kelurahan	Tersusunann ya profil desa/kelurah an	1	kel	3.000.000	3	Fasilitas penyusun an dan pemberday	Kelurahan	Tersusunann ya profil desa/kelurah an	1	kel	3.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	yaan profil desa/kelur ahan							aan profil desa/kelur ahan						
4	Fasilitasi kegiatan beragama	Kelurahan	Meningkatny a kualitas kegiatan keagamaan	12	Bulan	5.000.000	4	Fasilitasi kegiatan beragama	Kelurahan	Meningkatny a kualitas kegiatan keagamaan	12	Bulan	5.000.000	
5	Peningkat an kapasitas aparut dalam rangka pelaksana an siskamswa karsa di daerah	Kelurahan	Meningkatny a keamanan,ke trentaman ketertiban masyarakat dan berkurangny a tindak kriminalitas	12	Kel. Kranggan	15.000.000	5	Peningkata n kapasitas aparut dalam rangka pelaksanaa n siskamswa karsa di daerah	Kelurahan	Meningkatny a keamanan,ke trentaman ketertiban masyarakat dan berkurangny a tindak kriminalitas	12	Kel. Krangga n	15.000.000	
6	fasilitasi kegiatan penanggul angan kemiskina n	Kelurahan	terlaksananya kegiatan penanggula ngan kemiskinan	12	bulan	3.000.000	6	fasilitasi kegiatan penanggul angan kemiskinan	Kelurahan	terlaksananya kegiatan penanggula ngan kemiskinan	12	bulan	3.000.000	
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur							Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur							
1	Pengadaa n	Kelurahan	Tersedianya perlalatan	12	Bulan		1	Pengadaan perlengkap	Kelurahan	Tersedianya perlalatan	12	Bulan		

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	perlengkapan gedung kantor		gedung kantor					an gedung kantor		gedung kantor				
	Pengadaan kursi rapat	Kelurahan	Tersedianya kursi rapat					Pengadaan kursi rapat	Kelurahan	Tersedianya kursi rapat				
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kelurahan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	15.000.000	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kelurahan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	15.000.000	
	pengadaan soundsystem	Kelurahan	tersedianya soundsystem			20.000.000		Pengadaan soundsystem	Kelurahan	tersedianya soundsystem			20.000.000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	22.000.000	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	22.000.000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelurahan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	5.500.000	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelurahan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	5.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Kelurahan	Terpeliharaan ya peralatan gedung kantor	12	Bulan	1.500.000	5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Kelurahan	Terpeliharaan ya peralatan gedung kantor	12	Bulan	1.500.000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kelurahan	Terpeliharaan ya perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	3.000.000	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kelurahan	Terpeliharaan ya perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	3.000.000	
7	Rehab halaman kantor dan balai kelurahan	Kelurahan	terlaksananya rehap halaman kantor dan balai kelurahan	2	Unit	-	7	Rehab halaman kantor dan balai kelurahan	Kelurahan	terlaksananya rehap halaman kantor dan balai kelurahan	2	Unit	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	12	Bulan	6.500.000	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	12	Bulan	6.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kelurahan	Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	12	Bulan	2.000.000	2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kelurahan	Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	12	Bulan	2.000.000	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Kelurahan	Terbayarnya alat tulis kantor	12	Bulan	5.000.000	3	Penyediaan alat tulis kantor	Kelurahan	Terbayarnya alat tulis kantor	12	Bulan	5.000.000	
4	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kelurahan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12	Bulan	5.500.000	4	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kelurahan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12	Bulan	5.500.000	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	2.500.000	5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	2.500.000	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	2.500.000	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	2.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	undangan													
7	penyediaan makanan dan minuman rapat	Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama	12	Bulan	6.000.000	7	penyediaan makanan dan minuman rapat	Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama	12	Bulan	6.000.000	
8	Rapat rapat Koordinasi konsultasi dalam daerah	Kelurahan	Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap	12	Bulan	8.000.000	8	Rapat rapat Koordinasi konsultasi dalam daerah	Kelurahan	Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap	12	Bulan	8.000.000	
9	Jasa Pelayanan Perkantoran	Kelurahan	Terbayarnya upah 1 orang tenaga jaga malam merangkap tenaga kebersihan dan 1 orang tenaga IT	12	Bulan	109.500.000	9	Jasa Pelayanan Perkantoran	Kelurahan	Terbayarnya upah 1 orang tenaga jaga malam merangkap tenaga kebersihan dan 1 orang tenaga IT	12	Bulan	109.500.000	

Sumber :Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan Kranggan dihasilkan beberapa usulan yang merupakan prioritas berdasarkan pembahasan peserta musrenbang. Dari berbagai usulan tersebut, yang merupakan usulan prioritas selanjutnya diusulkan ke tingkat Kabupaten dalam forum musrenbang kabupaten. Namun demikian pelaksanaan kegiatan atas hasil usulan yang disetujui di tingkat kabupaten selanjutnya menjadi kewenangan dan akan dilaksanakan oleh OPD teknis sebagai pengampu kegiatan maupun dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan. Dalam hal ini Kecamatan Kranggan hanya bertindak sebagai fasilitator pelaksana kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan
Dari Para Pemangku Kepentingan

No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Kranggan tidak melaksanakan program kebijakan nasional seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), karena hanya berperan sebagai pendukung atau fasilitator dan lokasi kegiatan dari SKPD terkait.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kranggan.

Terselenggaranya *Good Governance*, pemerintahan yang baik harus dapat dicapai dan sebagai prasyarat utama bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk pemerintah Kecamatan Kranggan dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam kerangka tersebut diperlukan adanya kebijakan dan program yang jelas sebagai acuan tercapainya Visi dan Misi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2020, maka tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kranggan adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan** dari Kecamatan Kranggan adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :
 - a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
 - b) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

2. **Sasaran** dari Kecamatan Kranggan adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :
 - a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
 - b) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
 - c) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Pada Kecamatan Kranggan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2020	TARGET AKHIR 2023
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1	1
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	6,5	5
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Kranggan adalah :
- Pencapaian visi dan misi daerah.
 - Pengentasan kemiskinan.
 - Pendayagunaan potensi ekonomi local/daerah
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :

Program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung di Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung.

1. Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan

- Kegiatan : 1.1.Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan
1.2.Koordinasi Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Desa di Kecamatan
Kegiatan : 2.1.Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
2.2.Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
2.3.Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh
2.4.Fasilitasi Kawasan Perdesaan
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
Kegiatan : 3.1.Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
3.2.Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan
Kegiatan : 4.1.Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.2. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopinca)
5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
Kegiatan : 5.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
6.2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6.5.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
6.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.7. Penyediaan Makanan dan Minuman
6.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
6.9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
6.10.Jasa Pelayanan Perkantoran
6.11.Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/kantor.
7. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Kegiatan : 7.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
7.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
7.3. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
7.4. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7.5. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
7.6. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 8.1.Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Adapun secara rinci Program dan Kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2020 dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung
Tahun 2020

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Prgram /Kegiatan	Indikator Kinerja Prgram/ Kegiatan	Kinerja Tahun 2020						Alokasi Anggaran 2019	Perkiraan Maju Tahun 2021
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	BELANJA									
	BELANJA TIDAK LANGSUNG						-			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan		Kecamatan		14	bulan	1.703.491.222	DAU	1.703.491.222	
2	Belanja Tambahan Penghasilan / TPP		Kecamatan			bulan		DAU		
	BELANJA LANGSUNG		Kecamatan		12	bulan	440.765.500	DAU	380.498.000	493.751.000
A.	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan		Kecamatan					DAU		
1	Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : Pelayananadministrasi kependudukan; Pelayanan permohonan perijinan dan non perizinan sesuai kewenangan kecamatan; pengelolaan dan layanan informasi publik tingkat kecamatan ; Penyusunan LPPD dan LKPPD; penyusunan peraturan	Kecamatan		12	bulan	22.000.000	DAU	16.097.000	33.000.000

		desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD, dan PAW BPD; pembinaan pengisian buku administrasi desa; pelatihan aparatur pemerintahan desa; penanganan Pertanahan								
2	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan, perpenuhinya target pendapatn daerah	Kecamatan		12	bulan	70.000.000	DAU	69.952.000	77.000.000
B.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan							DAU		
1	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa;	Kecamatan		12	bulan	48.000.000	DAU	22.360.000	55.000.000

		<p>pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib administrasi keuangan desa; pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kec; penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan dan pendampingan desa binaan; pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan desa/kel, masyarakat, adat, dan hukum adat; pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat; pembinaan dan pengawasan BUMDesa dan BUMDesa bersama; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama antar desa dan musyawarah antar desa; pengolahan data profil desa/kelurahan dan profil kecamatan, pelaksanaan program kota tanpa kumuh.</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

2	Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan PKK di kecamatan dan pembinaan PKK desa/kelurahan	Kecamatan	Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK desa	12	bulan	12.000.000	DAU	10.908.000	11.500.000
3	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	terlaksananya Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	Kecamatan		1	kelurahan	5.000.000	DAU	7.340.000	5.500.000
4	Fasilitasi Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi Kawasan Perdesaan	Kecamatan		12	bulan	5.000.000	DAU	7.340.000	5.500.000
C.	Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan									
1	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi; pendataan rumah ibadah; perayaan hari besar keagamaan; pemberdayaan sosial dan perlindungan jaminan sosial; pembinaan dan	Kecamatan		12	bulan	18.000.000	DAU	7.740.000	25.000.000

		<p>pengawasan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial; rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan dan pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan; pembinaan dan pengawasan kekerasan terhadap perempuan dan anak; pelaksanaan program barang bersubsidi dengan lancar.</p>								
2	Koordinasi penanggulangan Kemiskinan	<p>Terlaksananya koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat kecamatan dan monitoring Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)</p>	Kecamatan	Terlaksananya penanggulangan kemiskinan	12	bulan	6.000.000	DAU	5.046.300	5.720.000
D.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan									
1	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<p>Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian;</p>	Kecamatan	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	12	bulan	7.600.000	DAU	3.309.500	8.500.000

		pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilihan umum; perayaan hari besar nasional.								
2	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopinca)	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	Kecamatan	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	3	orang	13.200.000	DAU	13.200.000	13.200.000
II	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN									
A.	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Daerah									
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan, pelaporan yang tepat waktu (RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan I s/d IV, RfK bln Januari s/d Desember, RKA, DPA, RKPA, DPPA dan Pakta Integritas)	Kecamatan		27	dokumen	5.000.000	DAU	1.285.500	3.500.000
III	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG OPERASIONAL							DAU		
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							DAU		

RENJA 2020

1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Kecamatan	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	12	Bulan	9.000.000	DAU	20.988.000	11.000.000
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	Kecamatan	Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	12	Bulan	21.000.000	DAU	3.497.700	22.000.000
3	Penyediaan alat tulis kantor	Terbayarnya alat tulis kantor	Kecamatan	Terbayarnya alat tulis kantor	12	Bulan	6.565.500	DAU	9.000.000	7.000.000
4	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kecamatan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12	Bulan	5.500.000	DAU	6.000.000	6.500.000
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	4.000.000	DAU	3.954.000	4.784.000
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	1.500.000	DAU	1.320.000	1.597.000
7	penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama	Kecamatan	makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama	12	Bulan	22.000.000	DAU	23.589.000	24.750.000
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalan dinas dalam daerah	Kecamatan	Tersedianya biaya perjalan dinas dalam daerah	12	Bulan	21.000.000	DAU	24.936.000	23.000.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Tersedianya biaya perjalan dinas luar daerah	Kecamatan	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	23.000.000	DAU	29.060.000	27.500.000

10	Jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan lembur	Kecamatan	Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan lembur	12	Bulan	4.000.000	DAU	35.388.000	4.400.000
11	Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor	Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	Kecamatan	Tenaga keamanan 2 Orang	12	Bulan	43.400.000	DAU	0	43.400.000
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							DAU		
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	12.000.000	DAU	9.998.000	13.750.000
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kecamatan	Tersedianya peralatan gedung kantor	12	bulan	12.000.000	DAU	9.575.400	13.750.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	10.000.000	DAU	9.993.000	15.000.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kecamatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	20.000.000	DAU	19.969.800	22.000.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	4.000.000	DAU	3.996.000	4.400.000
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kecamatan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	Bulan	5.000.000	DAU	4.654.800	5.500.000
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							DAU		
1	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Kecamatan	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	18	Orang	5.000.000	DAU	0	

KELURAHAN KRANGGAN

A.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan							DAU		
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kraggan	Kelurahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan	7	keg	272.044.000	DAU	904.000.000	
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Sarana Prasarana Lokal Lingkungan	Terlaksananya penyelenggaraan sarana prasarana local lingkungan	Kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan sarana prasarana local lingkungan	12	bulan	26.000.000	DAU	26.000.000	
3	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	terlaksananya Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	Kelurahan	terlaksananya Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	12	bulan	24.355.500	DAU	24.355.500	
4	Pembangunan Drainase Perkampungan/perumahan/lingkungan	Terlaksananya perbaikan drainase	Kelurahan	Terlaksananya perbaikan drainase	4	lokasi	105.000.000	DAU	0	
5	Pembangunan Jalan Lingkungan	Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan	Kelurahan	Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan	2	unit	100.000.000	DAU	0	
6	Rehab Balai RW Lingkungan	Terlaksananya rehab balai RW	Kelurahan	Terlaksananya rehab balai RW	4	unit	285.000.000	DAU	0	
7	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Terciptanya keamanan lingkungan	Kelurahan	Terciptanya keamanan lingkungan	2	unit	7.500.000	DAU	0	
8	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesenian	Tersedianya kostum kesenian	Kelurahan	Tersedianya kostum kesenian	7	paket	31.144.500	DAU	0	
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu/posbindu	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	7	paket	19.000.000	DU	0	
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan									
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksananya fasilitasi kegiatan kelembagaan Kelurahan	Kelurahan	terlaksananya fasilitasi kegiatan kelembagaan Kelurahan	15	lembaga	203.000.000	DAU	0	

2	Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan	Terciptanya kebersihan lingkungan Desa/Kelurahan	Kelurahan	Terciptanya kebersihan lingkungan Desa/Kelurahan	7	Lingkungan	10.564.000	DAU	10.564.000	
3	Penyusunan profil desa/kelurahan	Tersusunnya profil desa/kelurahan	Kelurahan	Tersusunannya profil desa/kelurahan	1	kel	2.100.500	DAU	2.100.500	
4	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Meningkatnya keamanan, ketertaman ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas	Kelurahan	Meningkatnya keamanan, ketertaman ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas	1	Kel	15.000.000	DAU	15.000.000	
5	fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan	terlaksananya kegiatan penanggulangan kemiskinan	Kelurahan	terlaksananya kegiatan penanggulangan kemiskinan	12	bulan	2.600.000	DAU	2.600.000	
6	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat	Kelurahan	Terlaksananya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat	12	bulan	3.992.000	DAU	3.992.000	
7	Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan	Terlaksananya musrenbang RKPD di Kelurahan	Kelurahan	Terlaksananya musrenbang RKPD di Kelurahan	1	keg	8.000.000	DAU	8.000.000	
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur									
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kelurahan	Tersedianya peralatan gedung kantor	12	Bulan	5.834.500	DAU	18.000.000	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung	Kelurahan	Tersedianya perlengkapan	12	Bulan	8.000.000	DAU	0	

		kantor		gedung kantor						
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kelurahan	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	21.000.000	DAU	29.000.500	
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kelurahan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	5.500.000	DAU	6.000.000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kelurahan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	Bulan	1.500.000	DAU	2.000.000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kelurahan	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	3.000.000	DAU	3.000.000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							DAU		
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kelurahan	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	7	orang	2.100.000	DAU	0	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Kelurahan	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	12	Bulan	7.500.000	DAU	7.500.000	
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	Kelurahan	Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	12	Bulan	2.500.000	DAU	2.500.000	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Terbayarnya alat tulis kantor	Kelurahan	Terbayarnya alat tulis kantor	12	Bulan	5.000.000	DAU	5.000.000	
4	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kelurahan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12	Bulan	5.500.000	DAU	6.000.000	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi	12	Bulan	3.000.000	DAU	3.000.000	

		bangunan kantor		listrik/penerangan bangunan kantor						
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	2.500.000	DAU	2.500.000	
7	penyediaan makanan dan minuman rapat	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama	Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama	12	Bulan	5.589.000	DAU	6.000.000	
8	Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap	Kelurahan	Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap	12	Bulan	8.000.000	DAU	8.000.000	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas keluar daerah	Kelurahan	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas keluar daerah	12	bulan	5.000.000	DAU	5.000.000	
10	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya upah 1 orang tenaga jaga malam merangkap tenaga kebersihan dan 1 orang tenaga IT	Kelurahan	Terbayarnya upah 1 orang tenaga jaga malam merangkap tenaga kebersihan dan 1 orang tenaga IT	13	Bulan	65.309.000	DAU	65.309.000	

3.3. Inovasi Perangkat Daerah

Kecamatan Kranggan di dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Sehingga dalam perjalanannya tidak memunculkan inovasi apapun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Kranggan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah guna terlaksana dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2020 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis baik ditingkat daerah maupun nasional. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Kranggan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2020 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kranggan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kranggan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2020 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD

Tahun Anggaran 2020. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2020 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2020 nanti.

Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana kerja Kecamatan Kranggan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD. Dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Kranggan mendapat alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.703.491.222,00 dan belanja langsung sebesar Rp 440.765.500,00.

Rencana tindaklanjut Kecamatan Kranggan pada tahun 2020 mendatang akan menetapkan 1 (satu) tujuan Kecamatan Kranggan, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa. Jumlah sasaran adalah 1 (satu) yaitu meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa dengan 4 (empat) indikator sasaran yaitu jumlah persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, persentase penanganan laporan kejadian, persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), persentase kegiatan yang selesai tepat waktu. Jumlah program adalah 8 (delapan) dengan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Kranggan tahun 2020 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2020 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Kranggan, 19 juni 2019
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO,S.IP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19701223 199009 1 001

4.